

PEREMPUAN DIHADAPKAN BANYAK PERSOALAN

Hari Kartini Tak Hanya Inspirasi



KR-Riyana Ekawati

Sri Sultan HB X bersama GKR Hemas berfoto bersama dalam puncak Hari Kartini Tahun 2022 di Bangsal Kepatihan.

YOGYA (KR) - Adanya pandemi, menjadikan kaum perempuan dihadapkan pada banyak problematika (persoalan). Diantaranya, meningkatnya beban tugas domestik, kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemutusan hubungan kerja, perceraian dan penurunan pendapatan keluarga bagi perempuan pelaku usaha. Namun dengan konsep pengarusutamaan gender yang harus diterapkan pada setiap sektor pembangunan dan lapisan masyarakat, peluang bagi perempuan menjadi ada.

"Untuk itu, momentum peringatan Hari Kartini tidak hanya dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi, tetapi harus ditransformasi untuk membangun legacy. Nyalakanlah api Kartini, jangan se-

kadar mewarisi abunya," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara puncak Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 DIY di Bangsal Kepatihan, Kamis (21/4).

Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 mengangkat tema "Berdaya dan Berkarya di Masa Pandemi, Perempuan Tangguh untuk Indonesia Tumbuh".

Sultan mengatakan, perempuan, khususnya pada kategori rentan seperti kepala keluarga, penyintas bencana, penyintas kekerasan dan perempuan terpinggirkan, perlu mendapat perhatian lebih agar bisa berdaya dan berkarya di masa pandemi. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak, untuk berkolaborasi dan membangun sinergi dalam mendukung

kiprah para penerus Kartini, menuju Indonesia sejahtera sejahtera.

"Kaum perempuan dapat mulai menapaki tahapan perjuangan baru, tidak sekadar menjadi penggerak paham feminisme atau peran domestiknya saja. Tetapi juga mengambil peran publik bersama-sama segenap potensi bangsa berjuang, menuju suatu Indonesia baru yang lebih baik, tanpa diskriminasi apapun," imbuh Sultan.

Sementara itu Ketua Panitia Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 DIY, Dhani Asep Suhendar melaporkan rangkaian kegiatan yang dilakukan, dimana Bhayangkari ditunjuk sebagai leading sector. Di antaranya kunjungan ke beberapa instansi, berbagai lomba, donor darah, hingga bazar online tingkat nasional.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan penghargaan kepada para pemenang lomba UMKM kategori kuliner dan mode, penghargaan pada dewan juri, dan penghargaan bagi perempuan inspiratif. Selain itu perayaan hari Kartini juga dimeriahkan pembacaan puisi 'Karena Kartini', penampilan tari dari Sanggar Seni Didik Nini Thowok serta persembahan lagu 'Karena Wanita' yang dinyanyikan ibu-ibu panitia Peringatan Hari Kartini Tahun 2022 DIY. **(Ria)-f**

Kolaborasi Astra Motor Yogyakarta dan Ditlantas Polda DIY Kobarkan Semangat #Cari_Aman Sambut Hari Kartini 2022



YOGYA (KR) - Perempuan merupakan calon ibu bagi anak-anak yang akan menjadi pemimpin bangsa. Mereka merupakan penggerak dan pendidik pertama bagi anak-anaknya, termasuk di dalamnya ketertibanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Sayangnya dalam konteks perilaku berkendara di jalan raya masih banyak ditemukan pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh perempuan.

Merespon hal tersebut, Astra Motor Yogyakarta selaku main dealer sepeda motor Honda wilayah DIY, Kedu, dan Banyumas berkolaborasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY mengadakan seminar safety riding menyambut peringatan Hari Kartini. Kegiatan ini diikuti oleh 106 perempuan perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta dan beberapa perwakilan dari sekolah binaan Astra Motor Yogyakarta di Astra Motor Safety Riding Center Yogyakarta (19/4).

"Tujuan pengendara sepeda motor di jalan raya hanya satu yaitu selamat sampai tujuan dan kita sebagai pengendara yang baik harus taat aturan lalu lintas," ungkap AKP Dwi Puji Astuti, S.H., M.M. PS Kasigar Subditgakkum Ditlantas Polda DIY.

Seminar safety riding kali ini dibagi menjadi beberapa segmen. Dimulai dengan pem-

bukaan oleh Dirlantas Polda DIY yang diikuti teori mengenai menaati aturan lalu lintas dan juga aturan tilang elektronik atau ETL yang isinya sedang populer saat ini.

Selain itu instruktur safety riding Astra Motor Yogyakarta juga berbagi ilmu mengenai pentingnya sosok perempuan pengendara sepeda motor untuk menjadi contoh dan role model keselamatan berkendara di jalan raya terutama bagi keluarganya. Hal tersebut dapat dimulai dengan menggunakan perlengkapan berkendara yang aman, saling menghargai sesama pengguna jalan dan juga konsisten mematuhi aturan lalu lintas.

Seminar safety riding kali ini dimeriahkan dengan beberapa aktivitas menarik seperti pemilihan kostum terbaik (best dresscode), safety riding reels competition dan juga kuis interaktif. Selain itu para peserta juga diberikan hadiah helm sebagai simbolis duta safety riding perempuan.

"Perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa menjadi contoh yang baik bagi anak maupun keluarganya. Termasuk di dalamnya dalam hal ini berkendara di jalan raya dan menaati peraturan lalu lintas," tutup Community Development & Safety Riding Supervisor Astra Motor Yogyakarta Muhammad Ali Iqbal. **(*)**

TUNGGAKAN PAJAK DAERAH RP 145 MILIAR Pemkot Punya Kewenangan Penagihan Paksa

YOGYA (KR) - Merujuk Perwal 123/2021 terkait tata cara penagihan pajak daerah, Pemkot Yogya kini memiliki kewenangan untuk menagih secara paksa. Terlebih sudah terdapat petugas juru sita pajak daerah yang dikukuhkan oleh kepala daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, menjelaskan upaya penagihan terhadap wajib pajak daerah yang menunggak kewajiban sudah banyak ia lakukan. Terutama dengan bekerja sama dengan pihak kejaksaan. "Ada upaya lain yang bisa dilakukan yakni penagihan paksa. Di DIY baru pertama kali, dan sudah dituangkan dalam Perwal 123/2021," jelasnya, Kamis (21/4).

Saat ini total tunggakan pajak daerah di Kota Yogya tergolong cukup tinggi, yakni mencapai Rp 145 miliar. Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda yang totalnya mencapai sekitar Rp 54 miliar.

Oleh karena itu, keberadaan Perwal 123/2021 akan terus disosialisasikan ke masyarakat. Mengacu perwal tersebut, alur penagihan pajak dimulai dari penerbitan surat teguran kepada wajib pajak. Terutama setelah lewat waktu tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. Jika selama 21 hari surat teguran itu tidak diindahkan, akan diterbitkan surat paksa.

Pajak harus dilunasi dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa. Jika sesudah batas waktu itu maka tindakan penagihan pajak akan dilanjutkan dengan penyitaan. "Sudah ada lima juru sita yang dikukuhkan Walikota Yogya. Mereka akan turun ke lapangan dengan bantuan dukungan dari wilayah untuk secara paksa menyita harta kekayaan wajib pajak maupun penanggung pajak. Ini yang akan kita lakukan untuk menagih," terang Wasesa. **(Dhi)-f**

21 Tahun Polkesyo 'Bersama Kuat, Bersama Hebat'

YOGYA (KR) - Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (Polkesyo) menyelenggarakan kegiatan peringatan Dies Natalis ke-21 Polkesyo di Auditorium Graha Bina Husada Polkesyo, Kamis (21/4) secara luring terbatas dan daring. Tema yang diangkat dalam dies kali ini adalah 'Bersama Kuat, Bersama Hebat'.

Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Joko Susilo SKM MKes mengatakan, Polkesyo merupakan satu di antara 38 Poltekkes di Indonesia di bawah binaan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Saat ini Polkesyo mengemban amanah menyelenggarakan pendidikan di 17 program studi yang bernaung di dalam 6 jurusan. "Polkesyo merupakan satu dari 18 Poltekkes di Indonesia yang sudah berbadan layanan umum. Selain itu Polkesyo merupakan satu di antara 10 Poltekkes kelas 1 dan satu di antara enam Poltekkes kluster 1. Dan sampai Desember 2021, Polkesyo merupakan Poltekkes terbaik kedua dalam Poltekkes kluster 1 tersebut," kata Joko.

Menurut Joko, sejalan dengan tema dies natalis yakni 'Bersama Kuat, Bersama Hebat', Polkesyo menegaskan siap untuk mengemban amanah sebagai penyedia tenaga kesehatan di dalam negeri. **(Dev)-f**



KR-Devid Permana

Peringatan dies natalis ke-21 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

MURAH..!
BELANJA MURAH LUAR BIASA MURAH BISA DAPAT RUMAH
Periode 1 Desember 2021 - 31 Mei 2022
DAPATKAN TAMBAHAN KUPON UNDIAN DENGAN TRANSKASI NONTUNAI

1 RUMAH TYPE 36 + Furniture
5 HONDA BEAT
5 HP SAMSUNG A52
10 LED TV SAMSUNG
10 VOUCHER BELANJA 1.000.000

DPRD KOTA YOGYAKARTA SUARA WAKIL RAKYAT JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PERLU DITINDAKLANJUTI PERDA DI KOTA YOGYA UU TPKS Harapan bagi Kaum Perempuan

YOGYA (KR) - Momentum Hari Kartini pada tahun ini semakin istimewa dengan disahkannya Undang-undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU tersebut menjadi harapan bagi kaum perempuan dan anak Indonesia terkait perlindungan hukum atas diskriminasi dan hak yang dirampas terhadap tindak pelecehan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari, mengungkapkan dengan hadirnya UU TPKS maka aparat penegak hukum memiliki legal standing dalam melakukan tindakan jika ada aduan maupun indikasi terhadap korban kekerasan. "Aparat bisa langsung melakukan proses penyidikan dan penegakan hukum," tandasnya.

Di samping itu, anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengemukakan, dalam UU tersebut juga memuat terkait *victim trust fund* atau dana bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual. Hal tersebut merupakan bentuk hadirnya negara terhadap korban agar mendapatkan perlindungan hukum yang

**Dhian Novitasari SPd
Wakil Ketua DPRD
Fraksi Gerindra**



KR-Istimedia

sudah menjadi hak setiap warga negara.

Dhian menambahkan, terdapat sembilan poin penting yang dibahas dalam UU TPKS. Masing-ma-

sing ialah pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual dan perbudakan seksual. "Dengan adanya UU ini artinya ke depan bagaimana kita perempuan dan anak di wilayah hukum Indonesia benar-benar merasa memiliki hak, mendapatkan keadilan, pemulihan dan perlindungan," harapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap di wilayah hukum Kota Yogya juga membuat kearifan lokal semacam perda terkait perlindungan tindak kekerasan dan pelecehan pada perempuan dan anak. Khususnya payung hukum untuk anak yang menjadi korban kekerasan baik fisik dan non fisik. Apalagi maraknya kekerasan anak saat ini karena semakin terbuka informasi serta pengaruh media sosial yang gampang diakses anak-anak usia labil dan belum bisa memilah hal-hal yang merugikan antar sesama. **(Dhi)-f**

JAGONGAN KALURAHAN DI GAYAMHARJO BIRO TAPEM GIATKAN PERENCANAAN KOLABORATIF DAN TEMATIK KAPANEWON MISKIN



Kanjeng Yuda, Sekda Sleman, Kadisnaker DIY, dan Penewu Prambanan saat sesi dialog dalam Jagongan Kalurahan

SLEMAN (KR) - Biro Tata Pemerintahan (Tapem) DIY kembali menginisiasi Jagongan Kalurahan di Balai Padukuhan Lemahbang, Kalurahan Gayamharjo, Prambanan, Sleman (20/4). Acara jagongan dihadiri Sekda Sleman, Disnakertrans DIY, OPD Pemkab Sleman (Disbud, Dinkop UKM, Dispartu dan Kapanewon Prambanan), Ketua Nayantaka, Lurah se Kapanewon Prambanan dan tokoh masyarakat Gayamharjo. Kapanewon Prambanan berbatasan dengan wilayah Klaten dan Gunungkidul, selain sebagai salah satu Kapanewon dengan tingkat kemiskinan tinggi di DIY.

Infrastruktur jalan menjadi masalah umum yang mengemuka dalam jagongan tersebut. "Ada banyak potensi wisata di Prambanan, namun kondisi akses jalannya sempit. Selain itu, masyarakat Prambanan menggiatkan seni budaya dan UMKM yang memerlukan pendampingan", kata Panewu Prambanan, Ishadi Zayid. Menurut Sekda Sleman, Harda Kiswaya, perencanaan tematik kalurahan menjadi opsi untuk mempercepat pembangunan sarpras di perbatasan. "Biasakan menyusun perencanaan kolaboratif dan tematik antar kalurahan dalam satu kapanewon, sehingga komprehensif masuk dokumen perencanaan Pemkab Sleman", lanjut Harda. KPH. H. Yudanegara, Ph.D., dari Biro Ta-

pem DIY sepakat dengan model perencanaan kolaboratif dan tematik. Menurutnya, pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan dan pengentasan kemiskinan pada 15 kapanewon miskin menjadi prioritas Pemda DIY dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Sarpras yang memadai tentu turut menggeliat perekonomian masyarakat. "Simpul strateginya berbasis pedesaan dengan mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Kalurahan harus menangkap peluang ini dengan menyusun perencanaan kolaboratif. Berikan tema spesifik dalam APBKal sesuai kebutuhan wilayah. Ada pembiayaan Danais, APBD DIY dan APBD Sleman yang bisa diakses kalurahan", tutur Kanjeng Yuda.

Untuk mendukung pengentasan kemiskinan, Kepala Disnakertrans DIY menyampaikan pelatihan SDM dan padat karya istimewa dengan output jalan cor-block ke wilayah-wilayah yang berpotensi tumbuh. Lalu Kepala Dinkop UKM Sleman menyampaikan pelatihan UMKM melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Kepala Disbud Sleman terkait pendampingan kebudayaan, serta Ketua Nayantaka terkait akses Danais kalurahan dari Pemda DIY. Acara Jagongan Kalurahan selanjutnya dilaksanakan di Hargowilis, Kokap, Kulon Progo (22/4). **(*)**